

DINAMIKA PEMERINTAHAN MODERN DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

*This article analyses the dynamics of modern Indonesian governance in the post-1998 reform era, characterised by decentralisation, good governance and digital transformation, yet facing serious challenges in preventing the abuse of power as regulated under Law No. 30 of 2014 on Government Administration. Three main forms of abuse of power—exceeding authority (*exces de pouvoir*), misappropriation of authority (*detournement de pouvoir*), and acting arbitrarily—are discussed through a normative literature review using a content analysis approach. Challenges such as the fragmentation of regulations under the Anti-Corruption Law, weak APIP capacity, and the poor CPI 2025 score are addressed through strategies to strengthen preventive oversight, civil service meritocracy, the digitalisation of SPBE, and legal harmonisation to achieve clean and accountable state governance based on AUPB.*

Keywords: *modern governance, abuse of power, Administrative Law, Law No. 30/2014, good governance, bureaucratic reform, APIP, PTUN*

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika pemerintahan modern Indonesia pasca-reformasi 1998 yang ditandai desentralisasi, good governance, dan transformasi digital, namun menghadapi tantangan serius pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tiga bentuk utama abuse of power—melampaui wewenang (*exces de pouvoir*), mencampuradukkan wewenang (*detournement de pouvoir*), dan bertindak sewenang-wenang—dibahas melalui kajian pustaka normatif dengan pendekatan content analysis. Tantangan seperti fragmentasi regulasi UU AP-Tipikor, kapasitas APIP lemah, serta CPI 2025 yang jeblok diatasi melalui strategi penguatan pengawasan preventif, meritokrasi ASN, digitalisasi SPBE, dan harmonisasi hukum untuk mewujudkan tata kelola negara berbasis AUPB yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: pemerintahan modern, penyalahgunaan wewenang, Hukum Administrasi Negara, UU No. 30/2014, good governance, reformasi birokrasi, APIP, PTUN

Pendahuluan

Pemerintahan modern Indonesia ditandai oleh transisi pasca-krisis 1998 yang memicu jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto, di mana demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi Asia menjadi pemicu utama perubahan sistemik menuju demokrasi liberal. Reformasi ini tidak hanya mengakhiri dominasi satu partai, tetapi juga membuka era multipartai dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Krisis politik Orde Baru ditandai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, serta dwifungsi ABRI yang membatasi partisipasi sipil dalam pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik yang meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Ketidakadilan sosial dan intervensi pemerintah terhadap peradilan semakin memperburuk kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. (Dhakidae, 2003).